



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH BUDIHARTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **126038**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/364 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **732.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC CVT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
8. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **464.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	525.353.309
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.921.353.309
III. HUTANG	Rp.	48.850.806
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.872.502.503

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.